

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim pada tingkat global menjadi fokus pembahasan di tingkat lokal maupun internasional. Perubahan iklim disebabkan oleh global warming atau pemanasan global yang menyebabkan ketidakstabilan lapisan bawah atmosfer bumi. Salah satu faktor penyebab terjadinya pemanasan global adalah peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi dan memerangkap panas matahari (United Nations, 2022). Perubahan iklim dapat mempengaruhi ekosistem lingkungan dan mengancam keamanan manusia. Pada alam perubahan iklim dapat mengakibatkan perubahan curah hujan di beberapa wilayah, kekeringan akibat suhu meningkat drastis, ketidak seimbangan alam, dan kenaikan permukaan air laut (United Nations, 2022).

Selain akibat perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya kenaikan permukaan air laut, fenomena ini mencakup sumber geologi seperti penyesuaian glacial-isostatic adjustment (GIA) yang mempengaruhi kenaikan permukaan laut di beberapa wilayah (Nicholls, 2021). Ilmuwan memproyeksikan peningkatan air laut global akan mencapai angka 0,28 meter di tahun 2050 dan pada tahun 2100 dapat meningkat di atas 1 meter berdasarkan data dari National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) (Lindsey, 2023). Hingga tahun 2023 tinggi rata-rata seluruh permukaan laut dunia adalah 101,4 milimeter (Lindsey, 2023). Tercatat mulai Februari 2023 hingga Januari 2024 pemanasan global telah mencapai batas 1,52C yang menjadi masalah krusial karena negara-negara anggota dalam Paris Agreement 2015 telah menyetujui membatasi kenaikan suhu global di batas 1,5C (Poynting, 2024). Negara-negara anggota dalam Paris Agreement memiliki kewajiban untuk menerapkan Nationally Determined Contributions (NDCs) sesuai dengan

kondisi lingkungan dan kemampuan setiap negara mengurangi emisi karbon (UNFCCC, n.d.).

Sebagai kawasan dengan iklim tropis dengan karakteristik negara kepulauan, Asia Tenggara menghadapi resiko tinggi bencana alam akibat perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut. Faktor lain seperti ekstraksi tanah dan pengembangan lahan di kota berpenduduk padat dapat meningkatkan resiko bencana akibat kenaikan permukaan air laut. Indonesia, Manila, dan Thailand adalah beberapa negara Asia Tenggara yang memiliki kota besar di pesisir pantai dengan banyaknya pembangunan infrastruktur, sehingga rentan terhadap dampak kenaikan permukaan air laut dan penurunan tanah. Salah satu upaya lanjutan Paris Agreement di kawasan Asia Tenggara, negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) melakukan penyusunan dokumen ASEAN Joint Statement on Climate Change sebagai bentuk komitmen dalam mengatasi emisi karbon dan mendukung pengendalian perubahan iklim (ASEAN, 2023). Berdasarkan ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 22nd Conference of the Parties (COP-22), negara-negara anggota ASEAN melakukan tindakan yang signifikan untuk menangani masalah perubahan iklim salah satunya dengan penandatanganan Paris Agreement 2015 pada tanggal 22 April 2016 di New York (ASEAN, 2016).

Dua ibukota di Asia Tenggara yaitu Manila ibukota Filipina dan Jakarta secara geografis memiliki kesamaan yaitu terletak di pesisir pantai, berbentuk kepulauan, dan berada di negara beriklim tropis. Manila dan Jakarta termasuk kedalam lima kota dengan resiko dampak besar kenaikan permukaan air laut di Asia Tenggara (Karlina Triana, 2021). Fenomena kenaikan permukaan air laut menimbulkan dampak yang cukup serius seperti banjir, utamanya pada wilayah pesisir. Banjir pesisir dapat terjadi akibat masuknya air laut ke daratan, dan dapat diidentifikasi dari dua variabel yaitu kenaikan permukaan air laut dan penurunan permukaan tanah (Okta, Widyatama, & Utomo, 2022). Ditambah dengan

pembangunan infrastruktur kedua ibukota negara Asia Tenggara yang tinggi berpengaruh terhadap struktur tanah dan menambah resiko bencana di kedua negara tersebut.

Tabel 1. 1 Perbandingan Data Manila dan Jakarta

	Manila	Jakarta
Jumlah penduduk	13.484.462	10.562.088
Luas wilayah	633 Km ²	662,33 Km ²
Kenaikan permukaan air laut	5,03 mm/tahun	1,71 mm/tahun
Penurunan permukaan tanah	10,9 cm/tahun	5-10 cm/tahun

Sumber: Penulis (diambil dari beberapa sumber)

Empat indikasi tabel diatas, merupakan data kondisi perbandingan Manila dan Jakarta. Diketahui jumlah penduduk di Manila 13.484.462 jiwa berdasarkan Sensus Penduduk dan Perumahan 2020 (Mapa, 2021). Sedangkan Jakarta dengan total penduduk pada tahun 2020 sebanyak 10.672.100 jiwa (BPS Jakarta, 2024). Ibu kota Manila memiliki wilayah seluas 633 km² (Salita, 2024). Luas keseluruhan wilayah DKI Jakarta berdasarkan website resmi kota Jakarta yaitu 662,33 km². Kemudian berdasarkan data observasi dari 1992-2020 yang dilakukan menggunakan satelit altimet kenaikan permukaan air laut di Manila mencapai 5,03 mm per tahun, sedangkan Jakarta 1,71 mm per tahun (Karlina Triana, 2021). Kedua kota memiliki persamaan dalam faktor lain yang mempengaruhi kenaikan permukaan air laut yaitu penurunan tanah. Manila dengan jumlah penurunan tanah 10,9 cm/tahun (Sulapas, Ybanez, Marasigan, M.Grageda, & A.Lagmay, 2024). Sedangkan Jakarta dengan angka penurunan tanah sebanyak 5-10cm/tahun (Karla, 2021).

Ibukota Filipina, Manila merupakan salah satu kota metropolitan yang rentan terhadap ancaman dampak kenaikan permukaan air laut. Berdasarkan laporan dari

Department of Environment and Natural Resources (DENR) pada saat ini hutan bakau yang ada di Teluk Manila berjumlah kurang dari 1.236 hektar (Delano, 2022). Berkurangnya hutan bakau yang berfungsi sebagai pelindung pantai dari air laut mengakibatkan Manila menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap pasang surut air laut dan badai topan. Banjir rob yang berasal dari laut menjadi ancaman utama bagi masyarakat pesisir pantai Manila.

Sedangkan Jakarta sebagai salah satu kota di Asia Tenggara dengan resiko bencana yang cukup besar akibat kenaikan permukaan air laut. Kenaikan tersebut mencapai 1,71 mm per tahunnya berdasarkan data terakhir pada 2020, menjadikan Jakarta terancam tenggelam jika angka kenaikan permukaan air laut semakin meningkat setiap tahunnya. Direktur Pusat Penelitian Perubahan Iklim Tyndall Inggris menobatkan Jakarta sebagai wilayah Asia paling terancam (Setyowibowo, 2021). Kenaikan permukaan air laut berpengaruh terhadap meluasnya garis pantai yang mengakibatkan hilangnya ekosistem di wilayah tersebut termasuk hutan bakau dan terumbu karang. Perubahan yang terjadi akibat hilangnya hutan bakau mengakibatkan terjadi kenaikan permukaan air laut dan besarnya gelombang laut menghempas ke daratan sehingga rawan terjadi banjir (Handian, 2019).

Seperti yang disebutkan sebelumnya, bencana akibat kenaikan permukaan air laut yang mengancam masyarakat pesisir dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan alam yang cukup besar. Maka dari itu diperlukan adanya keterlibatan pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta dukungan masyarakat pesisir dalam menghadapi fenomena kenaikan permukaan air laut. Selain itu, untuk memperoleh akses terhadap teknologi terbaru, sumber daya keuangan yang signifikan, serta dukungan ilmiah dari komunitas internasional diperlukan adanya kerjasama internasional (Rahman, 2024). Dalam konteks menghadapi resiko bencana akibat kenaikan permukaan air laut, kerjasama internasional yang dijalankan kedua kota tersebut yaitu dengan stakeholder maupun Non-governmental

Organization (NGO). Indonesia dan Filipina mengembangkan upaya adaptasi salah satunya melalui kolaborasi antara pemerintah daerahnya dan pemerintah Belanda, serta perusahaan riset Belanda untuk mengatasi kenaikan permukaan air laut (Balkestein, 2023).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kenaikan permukaan air laut menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini. Penelitian pertama berjudul “Dutch Involvement in International Water Development Projects via Masterplans: Comparative Case Study on Beira, Jakarta & Manila Bay” oleh Froukje Balkestein. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai salah satu proyek yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, Filipina, dan Mozambik untuk mengatasi dampak kenaikan permukaan air laut. Dalam tulisannya, Balkestein menjelaskan kedua masterplan memiliki kesamaan yaitu bekerjasama dengan pemerintah Belanda dan beberapa stakeholder baik lembaga pemerintahan maupun perusahaan swasta. Penelitian ini juga membandingkan bagaimana ketiga masterplan tersebut berjalan sesuai dengan substansi yang sudah ditentukan penulis (Balkestein, Dutch involvement in international water development projects via masterplans Comparative case study on Beira, Jakarta, and Manila Bay, 2023).

Penelitian kedua sebagai tinjauan pustaka berjudul “Future of Asian Deltaic Megacities under sea level rise and land subsidence: current adaptation pathways for Tokyo, Jakarta, Manila, and Ho Chi Minh City” oleh Anh Cao, Miguel Esteban , Ven Paolo Bruno Valenzuela, Motoharu Onuki , Hiroshi Takagi , Nguyen Danh Thao dan Nobuyuki Tsuchiya. Menjelaskan mengenai banjir yang disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut dan penurunan permukaan tanah yang terjadi di empat kota delta di Asia yaitu Tokyo, Manila, Jakarta, dan Ho Chi Minh. Keempat kota tersebut memiliki perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan politik namun memiliki strategi adaptasi kenaikan permukaan air laut. Dalam penelitian ini dijelaskan keempat kota delta di Asia menerapkan tindakan

penanggulangan berbasis rekayasa yang ditetapkan oleh pemerintah negaranya (Cao, et al., 2021).

Selain itu, terdapat penelitian oleh Brent Doberstein, Anne Tadgell, dan Alexandra Rutledge dengan judul “Managed retreat for climate change adaptation in coastal megacities: A comparison of policy and practice in Manila and Vancouver”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai strategi kebijakan retret terkelola atau manajemen mundur di dua kota pesisir Vancouver dan Manila. Penulis menjabarkan perbandingan praktik kebijakan kedua kota dalam menghadapi resiko kenaikan permukaan air laut, serta bagaimana partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam praktik strategi kebijakan retret terkelola (Doberstein, Tadgell, & Rutledge, 2019).

Menurut tinjauan pustaka yang dimasukkan dalam penelitian ini, belum ada yang spesifik menganalisis mengenai perbandingan strategi mitigasi dan adaptasi Pemerintah Filipina dan Indonesia sebagai upaya mematuhi Paris Agreement dalam mengatasi resiko kenaikan permukaan air laut di kota Manila dan Jakarta. Sehingga judul yang menjadi fokus penelitian ini adalah “Perbandingan Strategi Pemerintah Indonesia dan Filipina Mengatasi Kenaikan Permukaan Air Laut dalam Upaya Mematuhi Paris Agreement: Studi Kasus Manila dan Jakarta tahun 2016-2023”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang mengenai fenomena kenaikan permukaan air laut global. Penulis menarik rumusan masalah mengenai bagaimana perbandingan strategi mitigasi dan adaptasi yang dilakukan Indonesia dan Filipina dalam mengatasi kenaikan permukaan air laut sebagai upaya mematuhi *Paris Agreement* pada tahun 2016-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan sebagai syarat kelulusan penulis menyelesaikan Studi Strata Satu (S-1) Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbedaan strategi mitigasi dan adaptasi yang dilakukan pemerintah Filipina dan Indonesia sebagai upaya mematuhi *Paris Agreement* dengan pembuatan kebijakan mengenai kenaikan permukaan air laut melalui kerja sama internasional dan forum internasional.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Comparative Public Policy Theory

Teori perbandingan kebijakan publik merupakan studi yang mencakup banyak disiplin ilmu dan menggunakan kebijakan publik sebagai dasar analisisnya untuk membandingkan berbagai sistem dan lembaga, biasanya negara atau pemerintahan (Wong, 2016). Menurut Heidenheimer, perbandingan kebijakan publik merupakan studi tentang bagaimana, mengapa, dan apa pengaruhnya ketika pemerintah yang berbeda mengambil suatu tindakan atau tidak mengambil suatu tindakan (Heidenheimer, 1985). Perbandingan kebijakan publik memiliki sifat interdisipliner dimana ilmu politik hanya menjadi salah satu pilar landasan teoritis. Selain itu, perbandingan kebijakan publik menggunakan sistem politik dan lembaga sebagai variabel independen yang penting.

Menurut Gupta, perbandingan kebijakan publik memiliki tiga kategori dalam penelitian komparatif yaitu metode perbandingan, perbandingan teori melalui lembaga, dan membandingkan teori yang satu dengan lainnya (Gupta, 2012).

Kategori pertama mengacu pada metode tradisional untuk menjawab pertanyaan bagaimana kebijakan berbeda di berbagai negara dan apa yang menjelaskan perbedaan ini. Kategori kedua adalah pengujian dan pemanfaatan *Advocacy Coalition Framework* (ACF). ACF merupakan kerangka teoritis utama yang digunakan untuk mempelajari keseimbangan dan perubahan kebijakan. Variabel-variabel utama ini termasuk pembelajaran kebijakan, keyakinan kebijakan, koalisi kebijakan, dan subsistem kebijakan, dan berlaku dalam berbagai konteks, sistem, dan politik (Weible, 2014). ACF telah diaplikasikan kedalam 224 studi di seluruh benua dengan berbagai bidang kebijakan termasuk lingkungan, kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, teknologi, dan pariwisata (Weible, 2014). Kategori ketiga menekankan penggunaan sudut pandang teoritis dalam analisis, dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sama dalam kebijakan publik. Teori perbandingan kebijakan publik juga dapat diidentifikasi menggunakan teknik *Most Similar, Different Outcome / Most Different, Similar Outcome* (MSDO/MDSO) dengan mengidentifikasi kasus yang akan dibandingkan, kemudian mengidentifikasi variabel yang relevan (De Meur, Bursens, & Gottcheimer, 2006).

1.4.2 Climate Change

Perubahan iklim merupakan tantangan kompleks secara global yang mempengaruhi berbagai komponen disiplin ekologi, lingkungan, sosial-politik, dan sosial-ekonomi (Abbas, et al., 2022). Perubahan iklim berakibat pada peningkatan suhu secara global yang kemudian mengganggu perubahan cuaca dan mencairkan es di antartika. Tren jangka panjang dalam suhu dan curah hujan, serta elemen lain seperti tekanan dan tingkat kelembaban, menentukan perubahan iklim (Abbas, et al., 2022). Efek berantai dari perubahan iklim mengakibatkan semakin banyaknya

fenomena alam yang terjadi di beberapa bagian dunia. Dampak biofisik lainnya termasuk peningkatan intensitas dan luas badai, kondisi kekeringan yang berkepanjangan, kenaikan permukaan laut dan erosi pantai serta banjir yang terkait, dan peningkatan atau intensifikasi banjir bandang (UN Habitat Fukuoka, 2021) . Perubahan ini akan berdampak pada pemukiman manusia di seluruh dunia, dengan dampak yang paling parah di negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana populasi yang rentan lebih besar dan kapasitas untuk mengelola dampak mungkin terbatas (UN Habitat Fukuoka, 2021). Perubahan iklim memerlukan tindakan mitigasi yang tepat dan adaptasi untuk mengurangi dampaknya untuk lingkungan maupun makhluk hidup.

1.4.3 Mitigasi dan Adaptasi

Mitigasi dan adaptasi merupakan respon terhadap resiko yang dihasilkan oleh perubahan iklim. Mitigasi yaitu mengurangi dampak pemanasan global melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan penyerapannya, sedangkan adaptasi memiliki tujuan untuk mengurangi dampak buruk perubahan iklim yang tidak dapat dihindari melalui implementasi strategi yang ditujukan pada sistem yang rentan (Fussel & Klein, 2006). W.N Carter membagi mitigasi menjadi dua konsep yaitu struktural dan non-struktural. Mitigasi Non-struktural dilakukan dengan beberapa cara yaitu menciptakan kerangka hukum, mendirikan lembaga-lembaga, meningkatkan kesadaran publik, mengadakan pelatihan dan pendidikan, memberikan insentif, dan menyediakan sistem peringatan (Wialdi, et al., 2021). Mitigasi non-struktural terkadang perlu dilengkapi dengan adanya mitigasi struktural. Tindakan mitigasi struktural dapat berlaku pada struktur yang dibangun dengan perencanaan dan perhitungan rekayasa maupun struktur yang dibangun

tidak dengan rekayasa (Carter, 2008). Mitigasi menjadi fokus utama dalam membantu mengurangi dampak dari banyak perubahan iklim.

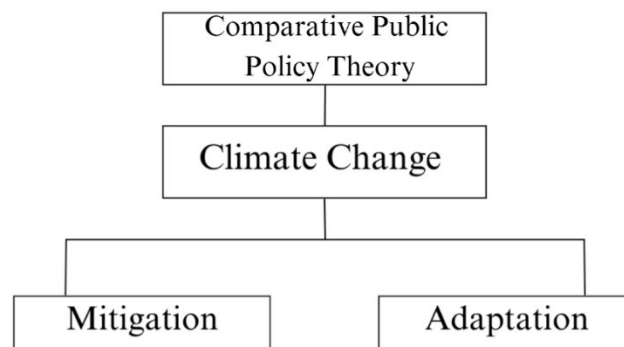
Adapun adaptasi merupakan proses yang terjadi dalam entitas dan sistem, atau penyesuaian yang dilakukan oleh manusia (Eisenack & Stecker, 2011). Tindakan adaptif dipengaruhi pada peristiwa atau kondisi yang terjadi sebagai bentuk reaksi atau penyesuaian. Salah satu tujuan dari adaptasi adalah meningkatkan kemampuan merespons secara efektif untuk mengubah tekanan guna mengendalikan atau mengurangi resiko (Engle, 2011). Menurut Klein, terdapat empat langkah-langkah dasar yang menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat dianggap sebagai proses multi tahap dan berulang utamanya pada pesisir yaitu pengembangan informasi dan peningkatan kesadaran, perencanaan dan desain, implementasi, dan pemantauan dan evaluasi (Klein, et al., 2001). Terdapat pula strategi adaptasi yaitu proteksi, retreat, dan akomodasi (Klein, et al., 2001). Proteksi merupakan salah satu strategi adaptasi yang dapat diaplikasikan melalui *hard structural option* dengan pembangunan tanggul, pagar laut, pintu air, dan sebagainya. Proteksi juga dapat diaplikasikan melalui *soft structural option* dengan penghalang intrusi air asin dan pemberian nutrisi pantai secara berkala. Retreat dilakukan secara terkelola dengan meningkatkan atau menetapkan zona kemunduran, merelokasi bangunan yang terancam, menghentikan secara bertahap pada daerah yang rentan, melakukan dan penataan kembali secara terkelola. Sedangkan pengertian akomodasi adalah menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi tanpa harus meninggalkan wilayah dengan melakukan perencanaan tanggap darurat, sistem evakuasi, asuransi terhadap bencana, memodifikasi penggunaan, dan menetapkan regulasi ketat zona bahaya (Klein, et al., 2001). Adaptasi yang efektif terhadap perubahan iklim bergantung pada dua syarat penting

yaitu informasi tentang apa yang harus diadaptasi dan bagaimana cara mengatasinya, dan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan langkah adaptasi.

Tabel 1. 2 Perbedaan Mitigasi dan Adaptasi

	Mitigasi	Adaptasi
Jangkauan Waktu	Tindakan mitigasi dilakukan pada saat perubahan iklim terjadi.	Proses yang dinamis, dilakukan setelah adanya peristiwa yang memerlukan tindakan adaptif
Jenis Kegiatan	• Pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan penyerapannya	• Proteksi • Retret • Akomodasi

1.5 Sintesa Pemikiran



Sumber: diolah oleh penulis

Sintesa pemikiran di atas berperan penting untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah perbandingan strategi kebijakan mitigasi dan adaptasi yang dilakukan Indonesia dan Filipina dalam mengatasi kenaikan permukaan air laut di Jakarta dan Manila. *Comparative Policy* merupakan alat yang akan digunakan untuk membandingkan strategi kebijakan kedua negara.

Konsep Climate Change berfungsi menjelaskan mengenai sebab-akibat terjadinya kenaikan permukaan air laut. Strategi kebijakan dianalisis melalui tindakan *mitigation* dan *adaptation*.

1.6 Argumen Utama

Upaya Jakarta dan Manila dalam menghadapi kenaikan permukaan air laut menunjukkan bahwa adaptasi dan mitigasi adalah strategi yang saling melengkapi. Jakarta lebih menekankan pendekatan infrastruktur teknis seperti sistem polder rob dan NCICD. Sedangkan Manila melalui Manila Bay Flood Protection Strategy (MBFPS) lebih mengutamakan solusi berbasis alam, seperti aquasilviculture, rehabilitasi mangrove, green embankments, dan foreshore islands. Program ini bukan hanya berfungsi sebagai perlindungan pesisir dari banjir rob, tetapi juga mendukung mitigasi melalui penyerapan karbon, terutama pada aquasilviculture dan green embankments yang selaras dengan Pasal 5 Paris Agreement. Pengambilan keputusan pelaksanaan program dipengaruhi oleh konfigurasi kerja sama dan kebijakan negara. Pada tahap mitigasi Jakarta menekankan pendekatan domestik, sedangkan Manila melakukan kerjasama bilateral dengan pemerintah Belanda. Pada tahap adaptasi Jakarta memulai kerja sama internasional melalui mekanisme trilateral dalam proyek NCICD bersama Belanda dan Korea Selatan, sedangkan Manila bergantung pada sumber dana multilateral seperti World Bank dan AIIB untuk program *managed retreat*, meskipun proyek rehabilitasi mangrove lebih bersifat lokal.

Perbedaan ini menegaskan bahwa Jakarta mengandalkan rekayasa teknis, sedangkan Manila menonjolkan pendekatan ekosistem. Keduanya sama-sama merefleksikan amanat Paris Agreement, khususnya Pasal 7 tentang adaptasi, namun dengan jalur implementasi yang berbeda sesuai konteks kelembagaan, pendanaan, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Bentuk kerja sama dalam mitigasi dan adaptasi menunjukkan kemampuan teknis kedua negara, serta pilihan politik dan pendekatan diplomasi iklim dalam mewujudkan implementasi nyata *Paris Agreement* 2015.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk mempermudah penulis menjelaskan mengenai apa yang ingin diketahui dalam penelitian. Menurut Ramdhan penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian, tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan deskripsi serta validasi mengenai fenomena yang diteliti (Ramdhan, 2021). Terdapat beberapa jenis tipe penelitian deskriptif menurut Ramdhan yaitu penelitian tindakan, penelitian kepustakaan, dan penelitian komparatif (Ramdhan, 2021). Dalam penelitian berjudul “Perbandingan Strategi Kebijakan Mengatasi Kenaikan Permukaan Air Laut Pemerintah Indonesia dan Filipina: Fenomena Kenaikan Permukaan Air Laut Manila dan Jakarta” ini menggunakan metode tipe penelitian deskriptif dengan jenis penelitian komparatif karena penelitian ini berusaha memberikan analisis perbandingan strategi kebijakan yang diambil oleh pemerintah kedua negara tersebut.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Sebuah penelitian memerlukan jangkauan penelitian untuk menentukan batasan dalam pembahasan agar tidak terjadi perluasan. Dalam penulisan penelitian ini, penulis membatasi topik yang dibahas berfokus hanya pada perbandingan strategi kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh pemerintah Indonesia dan Filipina untuk mengatasi fenomena kenaikan permukaan air laut yang dilakukan di Jakarta dan Manila. Penelitian ini membatasi topik yang dibahas dalam rentan waktu 2016-2023, karena pada 2016 kedua negara mulai mengambil langkah adaptasi dan mitigasi dengan menandatangani *Paris Agreement* mengenai *climate change* bersama dengan negara-negara lainnya. Sedangkan berdasarkan penelusuran data

dan dokumen resmi, diketahui bahwa pada tahun 2023 proyek adaptasi mengalami penundaan sehingga belum tersedia data terbaru yang dapat dipublikasikan secara resmi. Oleh karena itu, ruang lingkup kajian dalam penelitian ini dibatasi hingga tahun 2023.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian berjudul “Perbandingan Strategi Kebijakan Mengatasi Kenaikan Permukaan Air Laut Pemerintah Indonesia dan Filipina: Fenomena Kenaikan Permukaan Air Laut Manila dan Jakarta” peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dan dilengkapi dengan data sekunder. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder (Darmalaksa, 2020). Sugiyono mengatakan bahwa sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian secara observasi atau pengamatan langsung. Dia juga mengatakan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber dan diberikan kepada peneliti atau pengumpul data. Penulis melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta mengenai data strategi mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh Indonesia.

Sedangkan teknik pengumpulan sekunder artinya penulis tidak mendapatkan sumber data langsung dari pihak terkait, namun melalui media perantara. Tahap lanjutan setelah dilakukan pengolahan data dan pengutipan referensi yaitu menampilkan data sebagai temuan penelitian, kemudian diabstraksikan menghasilkan informasi yang utuh dan dilakukan interpretasi sehingga menghasilkan penarikan kesimpulan (Darmalaksa, 2020). Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari data dan laporan di website pemerintah Filipina dan pemerintah Indonesia. Selain itu, penulis juga memperoleh data dari website resmi perusahaan terkait proyek yang dilakukan oleh

kedua pemerintah serta penelitian terdahulu yang selaras dengan pembahasan strategi kebijakan mengatasi kenaikan permukaan air laut.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penulisan penelitian. Penulis menggunakan teknik komparasi *Most Similar, Different Outcome / Most Different, Similar Outcome* (MSDO/MDSO) oleh Gisele De Meur, Peter Bursens dan Alain Gottcheiner dalam buku *Innovative Comparative Methods for Policy Analysis*, teori ini menjelaskan perbandingan kedua negara dengan permasalahan sama, namun memiliki perbedaan dalam pengambilan kebijakan (Pratama, 2020). Pendekatan MSDO/MDSO berfokus pada pengidentifikasian variabel-variabel yang mempengaruhi hasil kebijakan. MSDO menjelaskan dalam serangkaian inisiatif legislatif menghasilkan pola pengambilan keputusan yang berbeda, dalam identifikasi kedua kasus yang mirip kemudian mengidentifikasi perbedaan antara kedua kasus tersebut (De Meur, Bursens, & Gottcheimer, 2006). Sedangkan logika MDSO digunakan untuk menjelaskan dalam serangkaian inisiatif legislatif menghasilkan pola pengambilan keputusan yang sama, dalam kedua kasus yang berbeda kemudian mengidentifikasi kesamaan diantara keduanya (De Meur, Bursens, & Gottcheimer, 2006).

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar penulisan sistematis dan tidak keluar dari Batasan penelitian yang sudah ditentukan. Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan pembahasan serta pembaca dapat memahami apa yang akan dijabarkan dalam penelitian ini. Sistematika pada penelitian ini dibagi menjadi empat bab yaitu:

Bab 1 berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian secara umum dan khusus, kerangka pemikiran, argument utama, dan metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab 2 berisi tentang penjelasan strategi mitigasi yang diambil oleh Pemerintah Filipina dan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kenaikan permukaan air laut .

Bab 3 berisi analisa implementasi strategi adaptasi pemerintah Filipina dan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kenaikan permukaan air laut berdasarkan metode komparasi yang sudah ditentukan.

Bab 4 Penutup terdiri dari Kesimpulan, kritik, dan saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai topik pembahasan tulisan ini.